RENCANA KERJA

KECAMATAN DOLOPO

KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2021

KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis KecamatanDolopo yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis KecamatanDolopo. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja KecamatanDolopo disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat KecamatanDolopo Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas

sumber daya manusia pada KecamatanDolopo. Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dolopo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja KecamatanDolopo tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun.

Dolopo, 2020

CAMAT DOLOPO

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN KECAMATAN DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO,S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197205241997032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **11**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 25

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.3.1 Pelayanan Kecamatan Dolopo 27

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Dolopo 28

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional 28

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan 29

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2021 30

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **36**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 37

3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **44**

BAB V PENUTUP **48**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Dolopo 14
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d …2021.. (tahun berjalan) Kabupaten Madiun 16
Tabel 2. 3 Sasaran Strategi Kecamatan Dolopo.....25
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun …2021…… Provinsi/Kabupaten/Kota …….....32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja KecamatanDolopo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja KecamatanDolopo memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja KecamatanDolopo 2021 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja KecamatanDolopo ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Dolopo sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Dolopo yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Dolopo tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo.

Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Dolopo untuk tahun Ke tiga/empat periode Renstra Kecamatan Dolopo 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Dolopo Tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Dolopo mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2021,

Renstra Kecamatan Dolopo, Renja K/L dan Renja Kabupaten Madiun. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Dolopo.

Apabila yang disusun merupakan Renja perubahan, maka perlu dicantumkan alasan perubahannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 15 Nomor 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 nomor 6)

33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Dolopo adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Dolopo dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Dolopo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 2021 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Dolopo adalah:

a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Dolopo.
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan KecamatanDolopo Kabupaten Madiun.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dolopo Kecamatan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2021.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2020

Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Kecamatan Dolopo pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.928.962.421,50,- dengan rincian :

a) Belanja Pegawai	: Rp. 3.625.612.421,50,-
b) Belanja Barang Jasa	: Rp. 303.350.333,40,-
c) Belanja Modal	: Rp. 22.716.100,-

Yang dialokasikan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan 2 Program dan 8 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.783.951.363,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96 %.

Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan program-program :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan.
   a. Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan Pelaksanaan administrasi . kepegawaian, sarana dan Prasaranadengan jumlah anggaran Rp. 193.352.333,40,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 179.066.850,- atau terealisasi sebesar 93 %.

b. Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Anggaran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.796.150,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 17.773.600,- atau terealisasi sebesar 100 %

c. Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan Operasional Kesekretariatan (Covid 19 New Normal) jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 18.301.023,- atau terealisasi sebesar 92 %

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa jumlah anggaran Rp. 23.220.250,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 22.914.000,- atau terealisasi sebesar 99 %

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban jumlah anggaran Rp. 11.268.750 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 11.000.000,- atau terealisasi sebesar 98 %

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan jumlah anggaran Rp. 23.366.850,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 23.098.100,- atau terealisasi sebesar 99 %

d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial jumlah anggaran Rp. 18.335.050,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 18.334.500,- atau terealisasi sebesar 100 %

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan atau terealisasi sebesar 98 %

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Dolopo diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga banyak pemberlakuan kebijakan-kebijakan baru baik dari pusat maupun daerah terkait dengan pembatasan aktifitas kegiatan masyarakat ;
2. Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang protokol Kesehatan Covid-19 dan kegunaannya terhadap penyebaran Virus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Madiun

Tabel 2. 1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2020

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebih Target	Solusi yang dilakukan
1.	-	-	-	-
2.	-	-	- -	- -
3.	-	-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-

Sumber:

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Dolopo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021
Kabupaten Madiun

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2018-203	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasional perkantoran	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listik	Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listik yang terbayar	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0

				Penyediaan Jasa Kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan yang terbayar	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan alat Tulis Kantor	Penyediaan alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan bahan makanan dan minuman	Penyediaan bahan makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
				Penyusunan	Penyusunan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0

				Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,printer, AC dan Mesin Tik)	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,printer,AC dan Mesin Tik) yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan									
				Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	1.Jumlah penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0	0	0	0	0	0
					2. Jumlah Rekomendasi APBDes yang dilaksanakan	10 Desa	10 Desa	0	0	0	0	0	0
				Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0	0	0	0	0	0

					Ketertiban								
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0	0	0	0	0	0
				Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0	0	0	0	0	0
				Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0	0	0	0	0	0
				Program Pelayanan Kesekretariatan	1.Nilai Sakip Kecamatan 2.Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daeah	81 78	62,19 87,41	0	0	0	0	0	0
				Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	1.jumlah Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan 2.Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	0 0	0 0	10 Kegiatan 93%	0	0	0	0	0
				Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	0	0	13 Dokumen	0	0	0	0	0
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)									
7	01	01		Program Penunjang Urusan	1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 0	0 0	83 79	62,19 87,41	74,92% 110,6%	84 78	87,57 79	87,57 74,92

				Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2. Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah								
				Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD									
7	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya tagihan telepon listrik	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan perundang-undangan di kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyelenggaraan	Terpenuhinya	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi di daerah								
7	01	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	02		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	03		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	04		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	05		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**									
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	06		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
				Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0

				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi
Kecamatan Dolopo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	77	83,95	109%

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Unsur Kewilayahan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun

No.	Indikator	SPM/sta n dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			76	77	78	79	82,28	83,95	87,41	87,41	-
2	Nilai Sakip Kecamatan			81	82	83	84	70,14	70,16	62,19	62,19	-

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dolopo menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Optimalnya Pelayanan didukung SDM yang memadai, sarana dan prasarana dan komitmen yang kuat dari pelaksana pelayanan
2. Dukungan stakeholder sebagai mitra penyelenggara pelayanan sangat dibutuhkan

2.3.1 Pelayanan Kecamatan Dolopo

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi pelayanan
2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat ;
3. Melaksanakan Sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada Masyarakat :
4. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di Wilayahnya
5. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya
6. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat

7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Masyarakat
8. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan ; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan mutu pelayanan

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Dolopo

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM pelaksana pelayanan/kegiatan di Kantor Kecamatan
b. Kurangnya Koordinasi dan Fasilitasi dari OPD dan stake holder pendukung tugas fungsi kecamatan

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan***

Berakhlak" Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

MISI I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.

MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.

MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.

MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan unsur Kewilayahan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan , Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

a. Kurangnya SDM yang memadai

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

c. Perlunya inovasi/terobosan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a. Komitmen yang kuat dari internal pelaksana

b. Banyaknya potensi SDM yang bisa ditingkatkan

c.SOP yang telah mapan dan diimplementasikan

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2021

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh KecamatanDolopo dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Memperkuat komitmen pelaksana pelayanan untuk memberikan yang terbaik
b. Membuat mekanisme kerja/SOP yang praktis,sederhana dan tidak berbeli-belit
c. Mengajukan usulan tambahan anggaran sebagai pendukung kegiatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Rancangan awal RKPD Kecamatan Dolopo dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan Dolopo terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan, Urusan Pilihan Kecamatan Dolopo terdiri dari - program dan - kegiatan. Serta 1 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai

dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Dolopo

lembar..... dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
			Nilai Sakip Kecamatan					Nilai Sakip Kecamatan			
a	Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	93.828.374	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	93.828.374	
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	23.451.835	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	23.451.835	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	81.674.090	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	81.674.090	
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	124.470.024	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Jenis	124.470.024	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	28.086.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	28.086.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di Desa		Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di	5 kegiatan	-			Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di	5 kegiatan	-	

			Desa					Desa			
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Kegiatan	-			Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Kegiatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	10.583.750	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	10.583.750	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	6.720.000			Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	6.720.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	75.125.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	75.125.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia	-		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia	-		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	4.253.400			Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	4.253.400	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	6.119.200	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	6.119.200	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	37.702.046	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	37.702.046	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2021 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2021 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ... Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah :.....

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nihil		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **"Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur".** Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing".** Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan danmenjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mentaldan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dankeamanandan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1			
2		Nihil	
3			
4			

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan administrasi pemerintahan unsur kewilayahan masuk pada misi ke-2 yaitu, “Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik” Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan Misi ke-2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dolopo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2021
1.	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan yang bekualitas	Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total dari Nilai Persepsi Per Usur)/ (Total Unsur yang terisi) x Penimbang	78
			Nilai Sakip Kecamatan	Hasil Nilai Sakip OPD yang dinilai Inspektorat	83

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2021 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2021 disusun sebanyak 6 program sesuai dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, 6 program tersebut yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (5)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ,(6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Dolopo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Madiun
Kecamatan Dolopo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7				**UN**	**UR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**			**KI**	**CAMATAN**											**4,036,891,810**	**4,039,891,810**					**4,418,782,750**
7	**01**	**01**		**PI**	**OGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,960,520,760**	**3,963,520,760**					**4,221,927,795**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Pe**	**encanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang ada		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 dokumen	8 dokumen			0	0					0
7	**01**	**01**	**2.02**	**Ad**	**ministrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,625,612,421**	**3,625,612,421**					**3,786,951,983**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji ASN tepat waktu		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			3,625,612,421	3,625,612,421	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,786,951,983
7	**01**	**01**	**2.06**	**Ad**	**ministrasi Umum Perangkat Daerah**											**143,134,129**	**143,134,129**					**154,431,754**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			5,324,565	5,324,565	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,857,830

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan materai		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,167,440
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			4,802,800	4,802,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,298,370
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			43,025,964	43,025,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,912,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor					12 bulan	12 bulan			13,600,800	13,600,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,080,614
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			1,980,000	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,980,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhinya kebutuhan mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			74,400,000	74,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				95,134,600
7	**01**	**01**	**2.08**	**P**	**yediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,648,400**	**101,648,400**					**108,787,250**

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			28,448,400	28,448,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,267,250
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan pengemudikantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			70,200,000	73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,520,000
7	**01**	**01**	**2.09**	**P**	**eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**93,125,810**	**93,125,810**					**171,756,808**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinaskantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			68,590,780	68,590,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76,056,886
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan peralatan kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			7,982,250	7,982,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,658,957

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			16,552,780	16,552,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				87,040,965
7	**01**	**02**		**PR**	**OGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**3,616,000**	**3,616,000**					**55,563,970**

7	**01**	**02**	**2.02**	**Pe**	**yelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**3,616,000**	**3,616,000**				**55,563,970**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kecamatan berjalan dengan baik		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			3,616,000	3,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,563,970
7	**01**	**03**		**PI**	**OGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**18,755,050**	**18,755,050**				**20,630,555**
7	**01**	**03**	**2.01**	**Ko**	**rdinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**18,755,050**	**18,755,050**				**20,630,555**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa berjalan dengan baik		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			18,755,050	18,755,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,630,555
7	**01**	**06**		**PI**	**OGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**54,000,000**	**54,000,000**				**120,660,430**
7	**01**	**06**	**2.01**	**Fa**	**ilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**54,000,000**	**54,000,000**				**120,660,430**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Penyelenggaraan tata pemerintahan desa berjalan dengan baik		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			0	0	Dana Insentif Daerah				61,260,430
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan lancar		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			9 desa	9 desa			54,000,000	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				59,400,000
															TOTAL	**4,036,891,810**	**4,039,891,810**				**4,418,782,750**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Dolopo pada tahun 2021. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2021, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Dolopo berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Dolopo berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Dolopo pada tahun 2021 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2021 (Tahun 2021)	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4		5		6		7		8	
7				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**											
				Administrasi Perangkat Daeah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	37.444.564	100%	35.981.000	100%	35.731.000	100%	-	100%	93.828.374
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	-	100%	-	100%	23.451.835	100%	23.451.835
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayar	100%	26.913.900	100%	23.911.500	100%	23.911.500	100%	6.937.190	100%	81.674.090
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100%	29.672.250	100%	21.156.000	100%	21.156.000	100%	52.485.774	100%	124.470.024

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
				Peningkatan efektivitas pelaksaanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	100%	-	100%	3.616.000	100%	-	100%	24.470.000	100%	28.086.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
				Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	8.689.050	100%	4.102.000	100%	2.982.000	100%	-	100%	10.583.750
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	-	100%	-	100%	-	100%	6.720.000	100%	6.720.000
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	-	100%	-	100%	-	100%	75.125.000	100%	75.125.000
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	100%	1.806.000	100%	4.557.000	100%	1.806.000	100%	-	100%	4.253.400

					Tokoh Masyarakat										
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
				Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsutasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsutasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	100%	-	100%	1.100.000	100%	15.543.950	100%	-	100%	6.119.200
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
				Fasilitasi, Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa	100%	18.800.600	100%	15.748.600	100%	9.725.400	100%	-	100%	37.702.046

BAB V
PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tanun 2021.

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Dolopo sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2021 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Madiun.

Madiun, 2020
CAMAT DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.SI.
Pembina
NIP. 19720524 199703 1 004